

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan pada pembangunan dan peningkatan laju pertumbuhan antar daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara terpadu, selaras, dan seimbang agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi di daerah tersebut.

Dalam kajian regional, konsep pembangunan pada suatu wilayah perlu memperhatikan karakteristik lokal (*Local Specific*) wilayah yang dapat meningkatkan potensi wilayah tersebut dan harus tetap mengacu pada kondisi wilayah itu sendiri (*Inward Looking*). Pemilihan prioritas pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut (Mujiono et al., 2021).

Menurut Rofiyanti (2015), pembangunan daerah dianggap mampu secara efektif menghadapi permasalahan pembangunan secara menyeluruh karena beberapa alasan. Pertama, pembangunan daerah sangat tepat diimplementasikan dalam perekonomian yang mengandalkan pengelolaan sumber-sumber daya publik. Hal ini dapat terjadi karena pengambilan keputusan secara otomi diyakini akan mampu menyederhanakan kompleksitas pengelolaan sumberdaya, mengintensifikasi pembinaan sumberdaya dan menekan peluang munculnya perilaku perusak lingkungan atau masalah moral. Kedua,

pembangunan daerah diyakini mampu memenuhi harapan keadilan ekonomi bagi Sebagian banyak orang. Ketiga, pembangunan daerah dapat mengurangi biaya transaksi yang terdiri dari biaya informasi, biaya yang melekat dengan harga komoditas dan biaya pengamanan. Negara dengan fisik geografis yang luas seperti Indonesia, akan terbebani dengan biaya transaksi yang tinggi sehingga merugikan bagi aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Keadaan ini mendukung lahirnya biaya informasi dan pengamanan akibat informasi asimetris. Keempat, pembangunan daerah dapat meningkatkan daya beli domestik. Kewenangan yang lebih besar dalam pembiayaan dipastkan membangkitkan insentif untuk meningkatkan alokasi sumberdaya dan modal dari daerah setempat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah diterapkan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Purnama, n.d.). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau suatu negara yang menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian suatu negara telah berkembang dengan baik (Purnama, n.d.)

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi umumnya digunakan angka PDB dan PDRB harga konstan. Bagi provinsi hasil ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena pada angka PDB atau PDRB harga

konstan sudah dihilangkan pengaruh inflasi dan sebagainya. Dengan menggunakan data PDB atau PDRB harga konstan akan diperoleh pertumbuhan ekonomi yang riil (Purnama, n.d.).

Menurut World Economic Forum (WEF) daya saing diartikan sebagai kemampuan ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Definisi lain juga diungkapkan Institute of Management and Development (IMD) menyatakan daya saing nasional adalah kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan cara mengelola asset, daya tarik investasi, globalitas serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu model ekonomi dan sosial (www.weforum.org). Sementara itu (Trianto, n.d.) menyatakan daya saing (opportunities) ditentukan oleh produktivitas suatu negara dalam menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modalnya. Pada dasarnya daya saing diperlukan untuk meningkatkan standar dan kualitas hidup serta untuk meningkatkan eksistensi ekonomi menjadi lebih berorientasi pasar. Lebih lanjut daya saing untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan efisiensi secara teknis dalam proses produksi.

Peningkatan Pertumbuhan ekonomi menjadi fokus dalam pembangunan Provinsi Jambi dengan menyelenggarakan pembangunan kewilayahan yang lebih diarahkan pada penggunaan ruang di Provinsi Jambi (pola ruang) yaitu menyerasikan kegiatan antarsektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berdasarkan kelestarian lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan dan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi berdasarkan pertimbangan

sektor prioritas dan kendala pengembangan yang ada. Dalam mengidentifikasi sector prioritas, sektor – sektor perekonomian perlu dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan multisektoral. (Rahmat et al., 2017), menyatakan bahwa pembangunan daerah dengan pendekatan multisectoral berciri seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor – sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu per satu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan dimana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut.

Terhitung sejak terbentuknya Provinsi Jambi pada tahun 1958, sejak awal periode pembangunan, struktur perekonomian Provinsi Jambi didominasi oleh sektor pertanian, meskipun kontribusinya dari tahun ke tahun cenderung menurun sebagai akibat meningkatnya kontribusi sektor lain. Hal ini dapat dilihat dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi Tahun 2018-2022.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (milyar rupiah)

Sektor PDRB	2018		2019		2020		2021		2022	
	Jumlah	%								
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	57893,12	27,85	60510,64	27,89	63563,09	30,99	73232,41	31,56	83574,86	30,25
B. Pertambangan dan Penggalian	41250,66	19,84	40095,86	18,48	25187,29	12,28	32983,06	14,21	53314,11	19,29
C. Industri Pengolahan	20669,37	9,94	21279,67	9,81	22005,03	10,73	23768,82	10,24	26988,68	9,77
D. Pengadaan Listrik dan Gas	133,13	0,06	145,52	0,07	153,10	0,07	165,62	0,07	191,07	0,07
E. Pengadaan air; Pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	282,86	0,14	303,80	0,14	311,52	0,15	331,08	0,14	351,76	0,13
F. Kontruksi	14732,79	7,09	16128,77	7,44	16416,36	8,00	18302,37	7,89	19027,91	6,89
G. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	24463,29	11,77	26332,21	12,14	25877,93	12,62	29038,22	12,51	33593,95	12,16
H. Transpoertasi dan pergudangan	6683,37	3,22	7019,11	3,24	5643,61	2,75	6045,59	2,61	7887,21	2,85

I. Penyediaan akomodasi dan makan minum	2468,90	1,19	2628,85	1,21	2434,25	1,19	2568,64	1,11	2901,79	1,05
J. Informasi dan komunikasi	7875,25	3,79	8472,44	3,91	9136,89	4,46	9512,95	4,10	10176,68	3,68
K. Jasa keuangan dan asuransi	4834,54	2,33	5046,14	2,33	5395,09	2,63	5976,35	2,58	6425,22	2,33
L. Real Estate	3223,09	1,55	3533,85	1,63	3567,87	1,74	3753,55	1,62	4151,36	1,50
M, N. Jasa Perusahaan	2489,71	1,20	2668,87	1,23	2582,95	1,26	2765,47	1,19	3558,99	1,29
O. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social wajib	9549,73	4,59	10474,10	4,83	9949,18	4,85	9999,47	4,31	9922,26	3,59
P. Jasa Pendidikan	7005,21	3,37	7615,44	3,51	7965,99	3,88	8200,96	3,53	8585,01	3,11
Q. Jasa kesehatan	2321,75	1,12	2572,61	1,19	2806,00	1,37	3315,43	1,43	3284,68	1,19
R,S,T,U Jasa lainnya	2001,91	0,96	2099,84	0,97	2085,84	1,02	2104,12	0,91	2380,83	0,86

Sumber : Provinsi Jambi dalam Angka Tahun 2023

Gambaran bahwa melemahnya daya saing daerah tidak terlepas dari belum meratanya pembangunan ke seluruh daerah, salah satunya dari segi perekonomian yang masih terdapat kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi bila pendapatan per kapita berdasarkan harga konstan tiada hentinya meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku merupakan satu di antara berbagai indikator dalam menggambarkan tingkat kemakmuran daerah. PDRB sendiri tersusun oleh tujuh belas sektor yang salah satunya ialah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang merupakan penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jambi.

Peranan sektor industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa output sektor industri atau Daya saing sektor industri tidak terlepas dari adanya peranan investasi dan tenaga kerja. Investasi yang dilakukan adalah investasi langsung berupa investasi asing (Penanaman Modal Asing) dan investasi domestik (Penanaman Modal Dalam Negeri). Investasi langsung dapat menyerap banyak tenaga kerja yang berada

dipasar tenaga kerja dan investasi langsung juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena output yang dihasilkan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya investasi di daerah (Ningsih et al., 2019)

Sektor industri merupakan penggerak perekonomian suatu negara karena dapat memberikan kesempatan kerja yang luas dan nilai tambah terbesar sehingga mampu menyelesaikan suatu masalah yaitu mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Salah satu indikator untuk melihat perkembangan sektor industri adalah dengan mengukur nilai produksi dari masing-masing kelompok industri. Untuk menghasilkan hasil produksi dengan baik, maka diperlukan rangkaian kegiatan yang membentuk suatu sistem produksi (El Islamy et al., 2023).

Peranan sektor industri terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi jambi cukup signifikan, PDRB saing sektor industri paling besar pada tahun 2022 adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar 5.613,33 milyar rupiah, berbeda signifikan dengan Kota Sungai Penuh yang berada pada posisi paling rendah dengan nilai PDRB sektor industri sebesar 32,49 milyar rupiah. Berikut data perkembangan PDRB sektor industri kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2022.

Tabel 1.3 PDRB Sektor Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	PDRB (2010) ADHK Sektor Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	177,23	184,48	184,31	186,59	193,33
Merangin	720,20	765,10	758,38	802,95	838,23
Sarolangun	413,02	414,62	414,68	420,29	426,07
Batanghari	1.321,32	1.334,23	1.319,53	1.311,23	1.302,38
Muaro Jambi	2.554,23	2.637,82	2.636,25	2.719,40	2.768,33
Tanjung Jabung Timur	1.216,71	1 220,11	1 235,32	1 232,82	1 256,07
Tanjung Jabung Barat	5.401,76	5.452,03	5.500,68	5.368,23	5.613,33
Tebo	612,80	642,72	638,09	662,09	675,66
Bungo	789,54	815,17	821,39	858,20	862,57
Kota Jambi	2.189,77	2.249,76	2.224,21	2.263,40	2.343,69
Kota Sungai Penuh	30,11	31,33	31,34	31,65	32,49
Provinsi Jambi	15.137,37	15.495,29	15.513,67	15.711,11	16.190,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2023

Walaupun PDRB sektor industri terbilang tidak merata, ketimpangan pembangunan manusia di Provinsi Jambi cenderung kecil. Pada Tahun 2022, indeks pembangunan manusia di wilayah provinsi Jambi meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 72,14 persen. Nilai indeks Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh berada di atas rata-rata wilayah. Sementara 9 Kabupaten/Kota lainnya yakni Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Bungo berada di bawah rata-rata wilayah dengan selisih yang terbilang sedikit. Bila dilihat selama kurun waktu lima tahun tersebut, Kota Jambi memiliki Indeks Pembangunan Manusia paling baik di Provinsi Jambi.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2018-2022

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jambi (Indeks)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	70,59	70,95	71,21	71,45	71,99
Merangin	68,81	69,07	69,19	69,53	69,98
Sarolangun	69,41	69,72	69,86	70,25	70,89
Batanghari	69,33	69,67	69,84	70,11	70,51
Muaro Jambi	68,34	69,01	69,18	69,55	70,18
Tanjung Jabung Timur	62,32	63,92	64,43	64,91	65,77
Tanjung Jabung Barat	67,13	67,54	67,54	68,16	68,79
Tebo	68,67	69,02	69,14	69,35	69,78
Bungo	69,42	69,86	69,92	70,15	70,55
Kota Jambi	77,41	78,26	78,37	79,12	79,58
Kota Sungai Penuh	74,67	75,36	75,42	75,70	76,17
Provinsi Jambi	70,65	71,26	71,29	71,63	72,14

Sumber : Provinsi Jambi dalam angka Tahun 2023.

(Makanoneng et al., 2019), menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Pada keadaan ini penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap daya saing sektor industri adalah tenaga kerja. Gambaran kondisi tenaga kerja sektor industri kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Penduduk Bekerja Pada Sektor Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Sektor Industri Kabupaten/Kota Provinsi Jambi (Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	1.453	1.720	3.335	915	997
Merangin	2.674	2.001	6.314	1.875	5.056
Sarolangun	2.178	2.874	6.105	4.064	4.568
Batanghari	2.466	2.889	10.578	6.014	2.880
Muaro Jambi	5.380	4.375	13.576	9.072	9.663
Tanjung Jabung Timur	1.023	736	2.903	1.078	1.048
Tanjung Jabung Barat	2.031	1.139	5.216	1.287	3.490
Tebo	3.900	3.191	7.390	2.810	2.600
Bungo	1.685	3.868	8.944	2.650	2.878
Kota Jambi	6.964	7.598	20.721	8.346	12.316
Kota Sungai Penuh	1.802	1.634	2.438	541	1.114
Provinsi Jambi	31.556	32.025	87.520	38.652	46.610

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2023

Jumlah tenaga kerja sektor industri pada tahun 2018 tertinggi terdapat di Kota Jambi yaitu sebanyak 6.964 jiwa dan yang terendah terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebanyak 1.023 jiwa, kemudian pada tahun 2019 tenaga kerja sektor industri tertinggi terdapat pada Kota Jambi yaitu sebanyak 7.598 Jiwa dan yang terendah terdapat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebanyak 736 jiwa. Kemudian pada tahun 2022 tenaga kerja sektor industri tertinggi terdapat pada Kota Jambi yaitu sebesar 12.316 jiwa dan yang terendah terdapat pada Kabupaten Kerinci yaitu sebanyak 997 jiwa.

Dalam suatu perekonomian kita tidak hanya sekedar membahas mengenai pentingnya PDB dan lapangan pekerjaan, namun juga perlu memperhatikan peran yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Suryahadi et al., 2012). Dukungan dari pemerintah tentunya sangat penting untuk keberhasilan sektor industri sendiri, salah

satunya adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan pendukung. Misalnya, dengan menciptakan kebijakan investasi dan ekspor, serta memberikan pelatihan dan pembinaan ketrampilan bagi para pekerja. Untuk itu kontribusi sektor industri berperan penting dalam menaikkan jumlah nilai PDRB, dengan menambah output dari sektor industri maka tentu saja akan berdampak positif terhadap daya saing sektor industri.

Investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan kenaikan jumlah nilai ekonomi yang mampu mendorong kenaikan output secara signifikan dan menambah besarnya permintaan input. Contoh permintaan input adalah tenaga kerja. Sehingga besarnya investasi akan mempengaruhi kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja bertambah, dengan begitu akan mencapai kesejahteraan masyarakat dikarenakan bertambahnya pendapatan. Yang dimana tenaga kerja sendiri merupakan salah satu faktor produksi, jika produksi meningkat maka investasi akan meningkat. Dapat dilihat pada tabel 1 setiap tahun jumlah nilai bertambah tiap tahun. Sehingga investasi dan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Pengaruh Investasi dalam menaikkan penyerapan tenaga kerja masih akan berpengaruh terhadap hal lain. Setelah naiknya penyerapan tenaga kerja maka diharapkan mempengaruhi daya saing sektor industri

Tabel 1.6 Jumlah Investasi Sektor Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Investasi Sektor Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	0,00	300,00	0,00	5.200,00	15.789,90
Merangin	36.102,20	10.213,80	24.144,60	281.725,40	59.361,10
Sarolangun	176.331,60	56.529,60	19.951,10	127.973,80	68.947,60
Batanghari	433.363,00	66.809,90	106.303,50	523.271,60	246.129,50
Muaro Jambi	512.576,00	54.723,10	69.456,30	324.968,90	381.618,70
TANJABTIM	22.223,00	90.990,50	16.688,60	139.961,90	173.279,20
TANJABBAR	269.826,80	253.991,50	80.351,90	252.532,20	424.612,70
Tebo	3.698,70	90.638,20	17.098,50	38.479,00	392.766,30
Bungo	419.404,20	204.707,00	105.545,70	132.516,90	599.118,50
Kota Jambi	1.762,50	5.106,90	59.924,90	5.803,90	11.912,70
Kota S. Penuh	0,00	0,00	0,00	5.793,00	1.874,60
Provinsi Jambi	1.875.288,00	834.010,50	499.465,10	1.838.226,60	2.375.410,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2023

Berdasarkan data dapat dilihat jumlah investasi sektor industri tertinggi pada tahun 2018 adalah di Kabupaten Batanghari yaitu sebesar Muaro Jambi yaitu sebesar 512.576,00 juta rupiah sedangkan terendah di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yaitu tidak ada sama sekali investasi sektor industri di kedua kabupaten dan kota tersebut. Kemudian pada tahun 2022 investasi sektor industri yang tertinggi yaitu di Kabupaten Bungo yaitu sebesar 599.118,50 juta rupiah dan investasi sektor industri terendah ada pada Kota Sungai Penuh yaitu sebesar 1.874,60. Data menunjukkan ketimpangan investasi sektor industri yang sangat tinggi.

Fenomena yang diperoleh dari data bahwa ketimpangan yang sangat tinggi dari segi PDRB sektor industri pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi, pada tahun 2022 PDRB sektor industri tertinggi ada pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar 5.613,33 milyar rupiah, sedangkan yang terendah ada pada Kota Sungai Penuh

yaitu sebesar 32,49 milyar rupiah. pertumbuhan sektor industri yang tidak merata antara kabupaten/kota di Provinsi Jambi tidaklah sejalan dengan kualitas sumberdaya manusia, ketenagakerjaan dan investasi yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota memiliki IPM yang baik, jumlah investasi yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang tinggi namun tidak berbanding lurus dengan daya saing sektor industri di daerah tersebut. Potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten/kota di Provinsi Jambi juga sangat prospek dan juga kabupaten/kota memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, sehingga sudah seharusnya daerah-daerah tersebut menemukan faktor yang dapat digunakan dalam upaya peningkatan daya saing sektor industrinya. Mengingat bahwasanya Provinsi Jambi mempunyai potensi besar lewat sumber daya manusia yang terus membaik setiap tahunnya. Serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Provinsi Jambi yang diketahui sebagai penyumbang terbesar kontribusi PDRB maka Provinsi harus dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk beranjak pada sektor industri yang dapat membentuk pergeseran struktur ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut penelitian ini dalam bentuk tesis yang berjudul **“ANALISIS DAYA SAING SEKTOR INDUSTRI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI”**.

1.2. Perumusan Masalah

Pada Tahun 2022 Provinsi Jambi mengalami ketimpangan PDRB sektor industri pada kabupaten/kota yang mana PDRB sektor industri tertinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar 5.613,33 juta rupiah dan yang terendah terdapat di Kota Sungai Penuh sebesar 32,49 juta rupiah data tersebut menunjukkan

ketimpangan yang sangat tinggi begitu juga dengan kabupaten/kota lain. Fenomena ini berbanding terbalik dengan IPM, jumlah tenaga kerja sektor industri serta investasi sektor industri yang ada di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi. maka seharusnya Provinsi Jambi menemukan faktor yang dapat digunakan dalam upaya peningkatan daya saing sektor industrinya, terutama yang menunjang kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengingat Provinsi Jambi kaya akan SDA yang dapat diolah sehingga Provinsi Jambi dapat mengolah SDA tersebut menjadi barang siap pakai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana daya saing sektor industri pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh IPM, tenaga kerja sektor industri dan investasi sektor industri terhadap daya saing sektor industri pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Latar belakang masalah dan rumusan masalah telah menjelaskan bahwa dalam penelitian ini akan mengkaji tentang daya saing sektor industri pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis daya saing sektor industri pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2022.

2. Untuk menganalisis pengaruh IPM, tenaga kerja sektor industri dan investasi sektor industri terhadap daya saing sektor industri pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini, yakni :

1. Memahami lebih dalam mengenai daya saing sektor industri pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
2. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai acuan dalam merencanakan strategi ekonomi guna meningkatkan daya saing sektor industri pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
3. Masyarakat dan mahasiswa yang sedang maupun ingin melakukan penelitian serupa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan